Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016

Legal Protection Against Victims of Crime by Banking Corporations According to Regulation No. 13 of 2016

Syapri Chan

Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Januari 2019; Diterbitkan: Februari 2019

*Corresponding Email: syapri.lawyer@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan dengan mengadopsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Permasalahan yang akan diteliti: Pertama, apakah korporasi perbankan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya? Kedua, bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana korporasi perbankan? Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, bahwa perbankan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, Kedua, mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan adalah melalui restitusi atau melalui gugatan perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan dapat memperoleh suatu perlindungan hukum berupa ganti kerugian berupa restitusi dan gugatan perdata.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Tindak Pidana, Korporasi, Hukum Perbankan.

Abstract

The purpose of this study was to initiate the concept of legal protection against victims of criminal acts by banking corporations by adopting the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation (PERMA) Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Actions by Corporations. Problems to be investigated: First, can a banking corporation be asked for criminal responsibility for the crime it committed? Second, what is the mechanism of legal protection for victims of banking corporate crime? This research is based on normative legal research that presents legal material in supporting the holistic nature of research. This study concludes, First, that banks can be held accountable for criminal acts committed, Second, the mechanism of legal protection against victims of criminal acts by banking corporations is through restitution or through civil lawsuits. The purpose of this study is to provide an overview to the public that the victims of criminal acts by banking corporations can obtain a legal protection in the form of compensation in the form of restitution and civil claim.

Keywords: Protection, Victims, Crime, Corporations, Banking Law.

How to Cite: Syapri Chan (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2) 2018: 68-75.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi. Pengertian perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain (Mertokusumo, 1991).

Menurut Kamus Black's Law: *Protection is (1) a. the act of protecting; defence; shelter of evil; preservation from loss, injury or annoyance; as we find protection under good laws and an upright administration; b. an instance of this; (2) one who or that which protect* (Graner, 2004).

Mengingat perbankan adalah institusi kepercayaan maka fungsi pengawasan yang ada di semua bank adalah mengembangkan mekanisme perlindungan nasabah bank. Inilah yang kurang dalam sistem perbankan di Indonesia. Kasus di Indonesia, sistem perlindungan nasabah masih belum terlembagakan dengan baik, sehingga penagakannya menjadi lemah, karena itu pengkajian kembali terhadap peraturan perundangan yang ada masih perlu terus dilakukan. Pengkajian terhadap asas-asas dan teori-teori hukum pidana yang selalu berkembang (Puspitasari *et-al*, 4).

Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah undang-undang yang memberikan payung hukum terhadap saksi dan korban. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 13 tahun 2006 sebagaimana yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari pengertian korban tersebut jelas bahwa korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan juga dapat dilindungi oleh Undang-Undang No.13 tahun 2006 hal tersebut berkaitan dengan kerugian

ekonomi (Moch. Anwar, 1986: 122).Selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Sehubungan dengan krisis yang berkepanjangan serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang mengakibatkan pula hancurnya lembaga perbankan merupakan dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank.Dampak berikutnya adalah timbulnya korban yang jauh lebih besar dari pada kejahatan biasa. Misalnya kasus Bank Century yang menjadi korban adalah nasabah penyimpan dana, dan rakyat secara keseluruhan karena selain modal dari bank tersebut juga mendapat pinjaman dari Bank Indonesia yang sesungguhnya uang tersebut adalah uang rakyat (Djumhana, 1993).

Menurut J. E. Sahetapy, pengidentifikasian terhadap korban akibat kejahatan yang dilakukan bank sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ruang lingkup korban kejahatan dibidang ekonomi begitu besar. Untuk itu perlu dikaji langkah-langkah atau kebijakan yang perlu diambil dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, agar tercipta kedamaian dalam kesejahteraan, termasuk perlindungan kepada korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan (Sahetapy, 1992).

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu cara menghimpun data kepustakaan dengan melakukan studi dokumen (Soekanto, 1986). Hal tersebut merupakan langkah awal pengumpulan

data yang dilakukan dipergustakaan, serta artikel jurnal, makalah dan surat kabar.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan peneliti yaitu studi kepustakaan, dengan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Studi kepustakaan mencakup data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan hukum primer, yakni meliputi beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku mengenai Hukum Perbankan, artikel-artikel jurnal, majalah, media elektronik lain dan juga buku-buku hukum lainnya; Selain itu juga digunakan bahan hukum tertier yaitu berupa kamus dan ensiklopedia dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Perbankan.

Metode pengolahan analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif, yang artinya data yang diperoleh tersebut di atas akan dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Sifat pendekatan kualitatif terletak pada kumpulan informasi subyektif yang berasal dari penulis maupun sasaran penelitiannya. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena

memberikan gambaran sesuai dengan keadaan sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan

Penyebutan korporasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah dengan menggunakan istilah “badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek hukum terdapat dalam Pasal 46 ayat (1), yang berbunyi: “Barang Siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) yang dimaksud lengkapnya adalah: “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Perlu diingat bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Hal ini berimplikasi pada beban pertanggungjawaban pidana, karena walaupun undang-undang ini telah mengakui korporasi perbankan sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi korporasi perbankan tidak dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban pidana

korporasi perbankan ada pada pengurus korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46.

Berdasarkan ketentuan tersebut, korporasi perbankan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, karena secara normatif tidak ada kejahatan korporasi perbankan. Mengacu pada Pasal 46, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perbankan tidak serta merta berakibat hukum pada dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi perbankan. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan korporasi perbankan, penuntutannya dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah dan/atau pimpinan dalam perbuatan tersebut (Amrullah, 2007). Dengan kata lain, dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas kapan suatu korporasi perbankan dapat dikatakan melakukan tindak pidana, sehingga tidak mungkin membebani pertanggungjawaban pidana kepada korporasi perbankan.

Korporasi yang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berakibat pada tidak dapat dituntut dan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan, khususnya sanksi pidana berorientasi pada pemenuhan hak korban, misalnya ganti kerugian. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat yang bertindak selaku korporasi di sini adalah bank. Korban kejahatan korporasi di bidang perbankan meliputi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat, nasabah bank, bank-bank yang bertindak selaku kreditur, pegawai yang bekerja pada bank yang bangkrut, masyarakat dalam arti luas (abstrak), serta stabilitas sistem perekonomian Negara yang terganggu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa lingkup korban kejahatan perbankan adalah sangat luas jika dibandingkan dengan kejahatan yang bersifat konvensional.

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bisa melewati batas-batas teritorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, namun semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh korporasi apabila berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan korporasi. Syarat berupa "berdasarkan hubungan lain" tersebut masih terlalu luas, karena bisa saja orang yang tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan korporasi, dapat menyebabkan korporasi ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya (Santo, 2012).

Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Korban Akibat Tindak Pidana Oleh Korporasi Perbankan Berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 PERMA No. 13 Tahun 2016 menyebutkan: "Kerugian yang dialami oleh korban akibat

tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata”.

Pengaturan tentang restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 disebutkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Ketentuan Pasal 1 angka 4 menyebutkan: “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 5 menyebutkan: “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

Jika diperhatikan ketentuan umum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tersebut, maka yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah korban yang mengalami “kerugian ekonomi” yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau

penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Restitusi

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial. Setelah merasakan pengalaman sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Penolakan tersebut terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara, sehingga keterlibatan korban lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-haknya dinilai akan membebani jalannya sistem yang ada. Selain itu juga dianggap akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum.

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya (Marasabessy, 2015).

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan

korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya (Muladi, 2002).

Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims pada butir 4 Part I General Principles telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana: *"Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process"* (Atmasasmita, 1992).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai entitas internasional, PBB menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan. Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan

mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan (Eddyono, et.al. 16).

Gugatan Perdata

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan PMH), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut: bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Selengkapnyanya bunyi pasal tersebut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian".

Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan PMH, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah: 1) Adanya perbuatan; 2) Perbuatan tersebut melawan hukum; 3) Adanya kesalahan; 4) Adanya kerugian; 5)

Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara PMH dan Kerugian.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, seseorang dapat menuntut ganti rugi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (<http://www.legalakses.com/gugatan-ganti-rugi-karena-pmh/>). Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang maka ada kepentingan orang lain yang merasa dirugikan. Dengan kata lain bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut. Hal ini juga berlaku bagi korporasi, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan pihak yang termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya, maka secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan (<http://madthomson.blogspot.co.id/2014/08/pertanggung-jawaban-perdatakorporasi.html>).

Pada umumnya bentuk badan hukum Bank konvensional menurut Undang-Undang Perbankan dan Bank berdasarkan Prinsip Syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT) dan didalam kedua undang-undang tersebut menyebutkan pengertian "orang" adalah termasuk badan hukum (sebagaimana rumusan pengertian "orang" dalam Pasal 1365 KUHPerdata), maka terhadap korporasi perbankan dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapatkan ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugatan perdata biasa. Namun, apabila korporasi perbankan tidak juga memberikan ganti kerugian, maka

pihak korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perbankan dapat mengajukan gugatan perdata (ganti kerugian) melalui Pengadilan Negeri setempat dalam wilayah hukum kedudukan korporasi perbankan dengan dasar adanya putusan perkara pidana korporasi perbankan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan harus mendapatkan perhatian yang khusus dari Negara maupun Pengadilan, mengingat korban adalah masyarakat para penyimpan yang mempercayakan dananya kepada perbankan. Apabila masyarakat telah hilang kepercayaannya kepada perbankan, hal ini akan mengganggu perekonomian Negara dan stabilitas keuangan.

Selanjutnya peneliti menyarankan agar Negara maupun Pengadilan tidak mempersulit bagi korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan untuk mengajukan restitusi maupun gugatan perdata dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan. Khusus gugatan perdata yang ditempuh korban, maka Pengadilan Negeri harus menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. (2007). Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Malang: Bayumedia,
- Anwar, M, (1986). *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, R. (1992). *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Djumhana, M, (1993). *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Eddyono, S.W. et.al, (2006). *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang*

- Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Graner, B.A. (2004). *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*. St. Paul. West: Thomson.
- Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*.
- Mertokusumo, S, (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Puspitasari, R.A. et-al, Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi DiBidang Perbankan, Artikel, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sahetapy, J.E. (1992). *Teori Kriminologi Sebuah Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santo, P.A.F.D. (2012). Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, *Jurnal HUMANIORA Vol.3 No.2 Oktober 2012*.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.